

RESISTENSI PENDUDUK PERDESAAN DALAM CERITA KESEHARIAN DI KALI LORO

Gutomo Bayu Aji*

Abstract

This analysis is revision of fieldwork journals during the exploration stages at Kali Loro collected in 1999. Data have been acquired through friendly approach, direct observation, and unstructured personal interview. Data analysis was carried out by applying the resistance concept which is defined by James C. Scott of daily narrations in Kali Loro. From the three presented narrations, they show that the kind of resistance contended by Kali Loro inhabitants is in concord with the nature of resistance proposed by Scott. While the first and the second narrations are in accordance with the hidden transcript category, the third one conforms with public transcript category. The resistance takes place in the forms of superior and subordinate structures in a meeting point process of the conflict of interest between class identity and class awareness.

Pendahuluan

Tiga ilustrasi singkat mengenai Koperasi Unit Desa (KUD), Pak Ka, dan pemuda berikut merupakan bagian kecil dari rencana jangka panjang penelitian struktur agraris di Kali Loro.** Ketiga ilustrasi ringkas itu dipilih sebagai contoh bukan karena mereka mewakili kelompok mereka, tetapi karena keadaan biasa yang terjadi sehari-hari mengenai

mereka itu merupakan bagian penting dari dinamika hubungan-hubungan kelas dalam struktur agraris di Kali Loro. Cerita-cerita biasa yang terjadi sehari-hari mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda itu dikumpulkan selama tahap eksplorasi tahun lalu. Data dikumpulkan melalui pendekatan bersahabat, observasi langsung, dan wawancara bebas. Tulisan ini

* Gutomo Bayu Aji, S.Sos adalah asisten peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Penelitian ulang Kali Loro telah berlangsung sejak November 1998 hingga saat penulisan dengan berbasis pada studi Ben White dan Ann Stoler tahun 1972-1973.

merupakan revisi dari kumpulan catatan lapangan itu yang ditujukan untuk membuka ide dan mempertajam masalah yang akan diteliti secara luas dan mendalam dalam penelitian struktur agraris di Kali Loro.

Perspektif Resistensi Scottian

Cerita keseharian mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda itu dikumpulkan karena selama ini selain kurang mendapat perhatian, juga kurang mendapat tempat dalam hubungan kelas di perdesaan. Sebagian besar peneliti lebih tertarik untuk melihat sejarah pemberontakan besar petani yang berlangsung secara sporadis sepanjang tahun. Hal ini bukanlah tidak penting, tetapi pemberontakan besar yang terjadi di kalangan petani selama orde pemerintahan itu pun kurang mendapatkan kajian yang memuaskan, dan sebagian besar telah ditanggulangi dengan mudah. Penelitian yang barangkali akan berguna, lebih sesuai, dan memuaskan adalah mengkaji hubungan-hubungan kelas biasa yang terjadi sehari-hari.

Scott telah mengawali “upaya ketidakpuasan” ini dengan sabar, dengan cara mendengarkan dan mengumpulkan cerita-cerita biasa yang terjadi sehari-hari, yang tidak pernah menjadi kepala berita di media massa dan

mengkajinya dalam hubungan kelas perdesaan di Asia Tenggara. Pendekatan pertama yang digunakan berkaitan dengan definisi perlawanan kelas, yang tidak dimaksudkan untuk mengatur suatu pembenaran, melainkan untuk menyoroiti masalah konseptual yang dihadapi dalam pengertian perlawanan itu. Dengan demikian, definisi itu bersifat hipotetis (yang masih diuji oleh Scott sendiri) dan dalam tulisan ini digunakan sebagai teori untuk mendekati cerita biasa yang terjadi sehari-hari mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda di Kali Loro. Agar mudah dimengerti dan dapat diterima secara luas, Scott mendefinisikan perlawanan itu sebagai berikut.

“Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk *melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan* (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk *mengajukan tuntutan-tuntutannya* sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan-

an) terhadap kelas-kelas atasan ini." (Scott, 1993: 302)

Menurutnya, ada tiga aspek dari definisi itu yang perlu diulas secara singkat. Pertama, tidak ada keharusan bagi perlawanan itu untuk mengambil bentuk aksi bersama. Kedua, – dan ini merupakan masalah yang pelik – tujuan-tujuan dibentuk ke dalam definisi itu. Ketiga, definisi itu mengakui apa yang dinamakan sebagai perlawanan simbolis atau ideologis (misalnya gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian tak terpisahkan dari perlawanan berdasarkan kelas (Scott, 1993: 303). Ketiga aspek dari definisi perlawanan itu membawa implikasi konseptual yang sangat berbeda dengan perlawanan kelas yang "sesungguhnya" yang diajarkan oleh Leninisme dan yang dianut oleh demokrasi kapitalis.

Perlawanan yang "sesungguhnya", demikian diperdebatkan, bersifat (a) terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat revolusioner, dan/ atau (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sebaliknya, penggabungan perspektif perlawanan kelas Gerald Mullin dan Eugene Genovese yang diartikan oleh Scott di atas

hasilnya mirip sebuah dikotomi antara perlawanan *seungguhnya* di satu pihak dan "tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal di pihak lain, yang bersifat, (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat 'untung-untungan' dan berpamrih (nafsu akan kemudahan), (c) tidak mempunyai akibat revolusioner, dan/ atau (d) dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada (Scott, 1993: 105).

Apabila dihadapkan pada bentuk-bentuk perlawanan bergaya Brechtian seperti yang diuraikan oleh Scott ini, misalnya, bekerja seenaknya, mengelabui, menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, mencuri kecil-kecilan, mencopet, taat dibuat-buat, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya, mungkin akan dihadapkan pada perbedaan antara apa yang disebut sebagai tindakan-tindakan perorangan yang bercirikan pamrih dan perlawanan. Scott melihat persoalan ini dari tujuan yang lebih dominan walaupun ia segera berargumen bahwa fusi antara keduanya itu akan membentuk tenaga vital sebagai sumber yang menjiwai perlawanan petani dan proletar. Argumen-tasi yang lebih sistematis adalah

apabila aksi-aksi seperti itu telah berubah menjadi pola yang tetap (sekalipun tidak terkoordinasi, apalagi terorganisasi), kita berhadapan dengan perlawanan (Scott, 1993: 310).

Kategori Resistensi (Scott)

Dalam karyanya yang lain, *Domination and the Art of Resistance Hidden Transcript* (1990), Scott meletakkan pengertian perlawanan itu dalam konteks hubungan dominasi dan subordinasi. Perlawanan itu terjadi, sebagaimana terkandung dalam definisi di atas, dari kelompok subordinat (kelas rendahan) ke kelompok dominan (kelas atasan), yang dinilai oleh E.P. Thompson (dalam Scott, 1990), berlangsung dalam suatu proses perjuangan kelas; menemukan titik pertentangan kepentingan dalam suatu dialektika penemuan antara identitas kelas dan kesadaran kelas. Pengertian dominasi dan subordinasi itu diuraikan oleh Scott sebagai berikut.

"These forms of domination are institutionalized means of extracting labor, goods, and services from a subject population. They embody formal assumptions about superiority and inferiority, often in elaborate ideo-

logical form, and a fair degree of ritual and 'etiquette' regulates public conduct within them. In principle at least, status in this system of domination is ascribed by birth, mobility is ritual nil, and subordinated groups are granted few if any political or civil rights. Although they are highly institutionalized, these forms of domination typically contain a strong element of personal rule" (Scott, 1990: 21).

Dalam konteks ini pula (sebagaimana yang telah dikatakannya sebagai *the art of resistance* dan sebagai implikasi praktis dari definisi perlawanan itu), Scott telah membedakan bentuk dan wilayah perlawanan itu ke dalam dua kategori yaitu yang disebutnya sebagai *public transcript* dan *hidden transcript*. Kedua kategori perlawanan itu dibedakan dari artikulasi perlawanannya; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budayanya. Secara singkat, *public transcript* dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan. Sementara *hidden transcript* dikarakteristik oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung, dengan sifat-sifat *offstage* antara kelas-kelas

subordinat dengan kelas-kelas dominan.*

Sebagai petunjuk awal, wilayah *public transcript* dalam ilustrasi berikut lebih diperankan oleh cerita mengenai pemuda, sementara *hidden transcript* lebih banyak diperankan oleh cerita-cerita mengenai KUD dan Pak Ka. Kendatipun demikian, uraian berikut ini selanjutnya tidak bermaksud untuk menonjolkan perbedaan antara kedua kategori tersebut secara konseptual ataupun memasuki perdebatan praktis mengenai perbedaan kedua kategori itu. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa maksud dari uraian ini adalah untuk menyoroti masalah konseptual yang dihadapi dalam pengertian perlawanan itu. Dalam konteks yang lebih luas, ialah antara kelas-kelas subordinat dan kelas-kelas dominan dan hubungan di antaranya dalam suatu masyarakat agraris.

Konsep Awal mengenai Struktur Agraris

Pendekatan kedua yang memberikan landasan struktural bagi pengertian perlawanan itu adalah

konsep struktur agraris. Struktur agraris merupakan konsep abstrak atau alat analitis untuk menganalisis struktur masyarakat agraris serta sumber-sumber dan dinamika perubahannya, dengan pendekatan *political economy* (multidisipliner). Struktur ini perlu dilihat sebagai sesuatu kekuatan yang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi tidak menentukannya. Dalam catatan internnya, White (1999) menjelaskan bahwa struktur ini menyangkut satu obsesi dalam ilmu sosial, yaitu usaha untuk menerangkan hubungan antara gejala-gejala yang terdapat pada tingkat makro-mikro, global-lokal, struktur-pelaku, dan masyarakat-individu. Konsep yang digunakan secara dini untuk kepentingan penulisan tahap eksplorasi bukannya bermaksud menyederhanakan, tetapi dapat diberikan batasan pengertian sebagai berikut, 'unsur dan kesatuan serta hubungan di antara unsur dan kesatuan itu dalam suatu masyarakat agraris'.

Apabila batasan pengertian itu dimanfaatkan sebagai alat analisis awal, setidaknya-tidaknya akan dapat dibedakan konsep struktur agraris

* *Offstage* ini mengambil perumpamaan pentas di atas panggung dimana penampilan dan perilaku para pemain teater di atas panggung berbeda dengan penampilan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan mereka di atas panggung adalah penampilan yang berpura-pura sedangkan kehidupan sehari-hari menampilkan kehidupan yang nyata.

itu dengan struktur lain dari dua aspek yang berbeda. Pertama, dari unsur-unsur (kesatuan atau komponen) yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur yang dimaksudkan ini berbeda dengan unsur 'abstrak' seperti yang dimaksudkan oleh ahli ilmu ekonomi pertanian yang disebutnya sebagai faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal (*land, labour, and capital*), melainkan unsur-unsur manusiawi dan kesatuan-kesatuan sosial seperti yang tertuang dalam ungkapan berikut.

Bukan 'tanah', tetapi mereka yang menguasai tanah

Bukan 'tenaga kerja', tetapi mereka yang bekerja di atas tanah itu, dan

Bukan 'modal', tetapi mereka yang menguasai modal (White, 1999).

Kedua, hubungan di antara unsur (manusiawi dan kesatuan-kesatuan sosial) itu akan menunjukkan bentuk dari struktur agraris. Pada disiplin ekonomi politik klasik, yang paling disoroti adalah hubungan antara mereka yang bekerja di pertanian dan mereka yang tidak bekerja, tetapi mengklaim sebagian dari hasil kerja tersebut berdasarkan atas penguasaan mereka akan faktor-faktor produksi nontenaga kerja: tanah dan atau modal (dan atau

kuasa politik). Selain ketiga kelompok sosial itu, sebenarnya terdapat banyak kelompok sosial lainnya dalam setiap masyarakat agraris. Di samping itu, dalam kenyataannya para aktor tersebut sering *overlap* (merangkap): seorang petani kecil bisa menjadi *landowner, labourer, dan capitaliust* sekaligus, seorang tuan tanah merangkap menjadi pedagang, aparat negara, pelepas uang, majikan, dsb (lihat catatan intern untuk Tim 'restudy Kali Loro', Ben White/3 vii '99).

Kedua pendekatan itu, yang pertama memberikan makna dinamis dalam konteks hubungan-hubungan dominasi dan subordinasi, dan yang kedua memberikan landasan struktural yang mempengaruhi kekuatan-kekuatan — tetapi tidak menentukan — konteks hubungan-hubungan tersebut serta perlawanan, akan digunakan secara aplikatif-terintegratif sebagai alat analisis awal untuk menganalisis cerita-cerita keseharian mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda berikut. Dengan demikian, tujuan dari penulisan tahap eksplorasi ini akan mengandung bias makna ganda dalam rencana penelitian selanjutnya, yaitu selain mengangkat dan mempertajam masalah, juga bersifat menguji hipotesis mengenai perlawanan itu.

Perubahan di Kali Loro

Kali Loro mempunyai posisi geografis yang strategis. Desa ini berada di sisi sebelah timur kaki bukit Pegunungan Menoreh hingga ke perbatasan Sungai Progo. Sungai ini telah menjadi sumber dari dua irigasi primer Selokan Mataram dan Selokan Kalibawang di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak zaman Jepang dan awal Orde Baru. Sisi tengah dari desa ini yang dekat dengan areal persawahan penduduk dilalui oleh Sungai Tinalah, yang juga memberikan matapencaharian bagi penduduk pada musim kemarau menjadi penambang batu dan pasir. Dengan demikian, areal persawahan di desa ini dikelilingi oleh dusun-dusun dan diapit oleh Sungai Tinalah dan Selokan Kalibawang yang

menjadi sumber irigasi primer areal persawahan serta mata air bagi penduduk dusun di atasnya yang berdiam di kaki Bukit Menoreh.

Jarak dari kota Yogyakarta ke desa ini sekitar 26 km dengan waktu tempuh kurang dari satu jam. Jarak desa ini ke kota Yogyakarta melalui ibukota Kabupaten Kulonprogo adalah 31 km. Ibukota Kecamatan Kalibawang berjarak 7 km ke arah utara dari desa ini. Dibandingkan dengan desa-desa lain dalam satu wilayah kecamatan, desa ini tampak menonjol, baik dalam produksi pertanian tanaman pangan, terutama padi, maupun infrastruktur fisiknya. Areal produksi pertanian, tanaman padi, di desa ini mencapai 640 ha, terluas daripada desa-desa lain.

Tabel 1
Migrasi Keluar menurut Jenis Kelamin, Tahun Pindah, dan Tempat Tujuan

Pindah ke	Sebelum 1970		1970-1979		1980-1989		1990-1999		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Satu Desa	30,3	48,3	24,7	31,8	36,1	32,9	20,5	18,3	26,5	26,8
Lain Desa dalam Propinsi DIY	12,1	27,6	4,9	12,1	8,9	14,1	10,0	16,5	9,0	15,8
Jateng, Jatim	12,1	6,9	21,0	15,2	12,0	15,4	15,7	16,1	15,2	15,2
Jakarta, Jabar	6,1	3,4	21,0	18,2	22,2	19,5	36,1	32,6	27,6	24,5
Sumatra	30,3	10,3	23,5	16,7	11,4	14,8	10,8	9,6	14,2	12,3
Kalimantan	3,0	3,4	3,7	3,0	6,3	1,3	2,4	3,2	3,8	2,6
Lainnya	6,1	0,0	1,2	3,0	3,2	2,0	4,4	3,7	3,6	2,8
Jumlah %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	33	29	81	66	158	149	249	218	521	462

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

Pusat pelayanan publik seperti BRI, KUD, LSM, kios telepon, pendidikan dari tingkat SD sampai SMU/SMK, pasar, dan pertokoan sebagian besar terkonsentrasi di desa ini. Di persimpangan jalan desa ini tumbuh terminal liar yang strategis, yang memberikan pelayanan tunggu bagi penduduk desa menuju ke Yogyakarta, Wates, Muntilan, dan Samigaluh.

Pertumbuhan penduduk desa ini selama 1980-1990 adalah (-)0.33. Rendahnya pertumbuhan ini antara lain disebabkan migrasi keluar (program transmigrasi) yang cukup besar ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, yang telah dilakukan penduduk sejak awal pemerintahan Orde Baru. Di samping itu, banyak penduduk menjadi TNI yang harus bertugas ke luar desa, dan banyak pemuda yang mencari pekerjaan ke kota

menjadi buruh, terutama di kawasan Jabotabek. Sampai tahap eksplorasi ini, jumlah penduduk desa (dengan luas wilayah 11,7 km²) adalah 9.771 orang, terdiri dari 4.092 laki-laki dan 5.079 perempuan yang tergabung ke dalam 2.252 kk. Permukiman penduduk terkonsentrasi di daerah yang landai di sepanjang Sungai Progo dan Sungai Tinalah yang tidak jauh dari areal persawahan. Daerah ini telah menjadi kompleks permukiman konsentris terhadap penduduk di daerah kaki bukit. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah persimpangan jalan desa itu telah berimbas ke sepanjang jalan desa yang dilalui sarana angkutan darat.

Daerah yang berada di kaki bukit itu memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Mereka umumnya mengerjakan

Tabel 2
Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Kalibawang, dan Kali Loro, 1961 - 1990

Tahun	Kabupaten Kulonprogo		Kecamatan Kalibawang		Kali Loro	
	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun
1961	337.154	-	27.334	-	8.483	-
1971	371.103	0,96	29.035	0,61	8.530	0,06
1980	380.685	0,28	29.143	0,04	8.537	0,01
1990	372.209	-0,22	27.214	-0,68	8.257	-0,33

Sumber: White (1999).

sawah penduduk yang tinggal di daerah inti desa itu. Selain menjadi buruh tani, mereka juga memanfaatkan tegalan yang letaknya terpencar di lereng bukit itu serta mengerjakan pekerjaan non-farm seperti menganyam *keping* dan menjual kayu bakar. Daerah di kaki bukit ini lebih mirip sebagai daerah pinggiran yang dalam struktur agraris tergantung kepada penduduk di daerah inti.

Dinamika Struktur Agraris

Hasil survai tahun 1973, yang dilaporkan oleh Stoler (1975), menunjukkan bahwa 6 persen dari 478 rumah tangga memiliki lebih dari separo luas tanah sawah yang ada, 37 persen rumah-tangga tidak memiliki tanah, dan 40 persen rumah-tangga lainnya bekerja di sektor pertanian. Dengan kata lain, 75 persen rumah tangga di Kali Loro pada waktu itu harus mencukupi kebutuhan subsistensi mereka dari sumber-sumber lain, selain kepemilikan tanah dan tanah garapan mereka yang sempit. Sumber-sumber itu, antara lain, adalah buruh upahan di sektor pertanian terutama buruh tani, berdagang seperti *bakulan*, *bakul eyek*, *mendreng*, *bakul adang-adang*, memproduksi kerajinan rumah tangga seperti menganyam *keping* dan menganyam tikar, membuat

slondok dan gula aren, dan mengolah hasil-hasil pekarangan yang dapat dijual atau dikonsumsi sendiri.

Sementara itu, survai rumah tangga yang dilakukan pada tahun 1999 memperlihatkan bahwa dari 549 rumah tangga yang disurvei, hanya 9,8 persen dari rumah tangga itu yang menguasai luas lahan garapan sawah di atas 3000 m². Sekitar 9,7 persen menguasai luas lahan garapan 2000–2999 m²; 22,1 persen menguasai luas lahan garapan 1000–1999 m²; 22,2 persen menguasai luas lahan garapan 1000 m²; dan 36,2 persen tidak menguasai luas lahan garapan sawah (*landless*). Dengan kata lain pula, 90,2 persen rumah tangga di Kali Loro menguasai luas lahan garapan sawah kurang dari 3000 m². Mereka harus mencukupi kebutuhan subsistensi mereka dari sumber-sumber lain seperti mengembangkan variasi dari jenis pekerjaan buruh tani, buruh bangunan, berdagang, membuat kerajinan, buruh jasa angkutan, dan jasa umum lainnya.

Menyempitnya kepemilikan tanah sebagai konsekuensi dari pola pewarisan yang harus dibagi kepada sejumlah kepala rumah tangga, proses jual beli tanah, terutama pekarangan untuk fungsi nonproduktif, berkembang pesatnya usaha jasa, terutama

yang terkonsentrasi di daerah pusat, munculnya usaha ekonomi Pak Ka yang berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja pertanian ke nonpertanian di daerah itu, dan terakumulasinya tanah-tanah milik kepada segelintir orang (elit-elit baru yang muncul dari usaha nonpertanian), setidaknya-tidaknya telah mendorong adanya perubahan formasi dalam struktur agraris di Kali Loro. Formasi pekerjaan di sektor formal misalnya seperti PNS, TNI, dan pegawai swasta juga telah meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan penduduk desa.

Di luar pesatnya pengaruh usaha nonpertanian di desa itu, pergeseran penguasaan lahan di

sektor pertanian juga berlangsung secara internal. Faktor yang berpengaruh terhadap gejala ini adalah pola pewarisan yang masih berlangsung. Elit-elit lama yang ditandai oleh adanya karakter feodalistik dengan penguasaan tanah yang luas, kini menyusut atau boleh dikatakan telah hilang. Hilangnya elit-elit lama di dusun pinggiran telah diikuti oleh munculnya elit-elit baru di pusat sehingga semakin terpuruknya status sosial-ekonomi dusun pinggiran itu diikuti oleh menguatnya ketergantungan dusun pinggiran itu terhadap pusat.

Dalam formasi kelas rendahan, hubungan kerja itu terlihat rumit karena terjadinya tumpang-tindih

Tabel 3
Persentase Lapangan Pekerjaan Pokok menurut Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Pokok	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	persen	N	persen	N	persen
Pertanian	273	47,7	108	21,2	381	35,2
Pekerja Keluarga Pertanian	24	4,2	34	6,1	58	5,4
Buruh Tani	76	12,5	72	14,1	148	13,7
Industri	12	1,1	89	17,5	111	9,4
Bangunan	32	5,6	8	1,6	40	3,7
Angkutan	23	4,0	-	-	20	1,8
Perdagangan	40	7,0	136	26,7	176	16,2
Jasa Umum	77	13,5	46	9,0	123	11,3
Jasa Swasta	16	2,8	17	3,3	33	3,0
Jumlah	573	100	510	100	1083	100

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

Tabel 4
 Persentase Jenis Pekerjaan Sambilan ART yang Bekerja
 berdasarkan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Sambilan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	persen	N	persen	N	persen
Perdagangan	26	13,0	27	13,8	53	13,4
Industri Kerajinan	12	6,0	34	17,4	46	11,6
Angkutan	5	2,5	-	-	5	1,3
Jasa Umum	9	4,5	-	-	9	2,3
Jasa Swasta	10	5,0	3	1,5	13	3,3
Petani	49	24,5	11	5,6	60	15,2
Buruh Tani	84	42,0	114	58,5	198	50,1
Petani Pekerja Keluarga	5	2,5	6	3,1	11	2,8
Jumlah	200	100,0	195	100,0	395	100,0

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

di antara posisi kerja yang subordinat. Sebagai contoh, seorang petani penggarap pada musim tanam padi menggarap tanah garapannya seluas 1.000 m² (dengan sistem bagi hasil: *maro*) bersama istri dan anaknya. Pada saat yang sama pula, istrinya bekerja sebagai buruh (tanam) di sawah milik orang lain, dan menganyam *kepang* pada malam harinya, sementara suami menjadi buruh mencangkul. Ketika musim panen, rumah tangga itu menawarkan tenaga sebagai *penderep* untuk memperoleh *bawon* dari petani dan penebas. Pada musim tanam palawija, suami-istri itu mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan batu

dan pasir di Sungai Tinalah untuk dijual ke Pak Ka.

KUD Simbol Perlawanan Kaum Tani

Satu pertanyaan yang diajukan adalah mengapa bukan kelas-kelas atasan yang menjadi simbol perlawanan kaum tani, tetapi justru KUD yang merupakan wadah kooperatif bagi petani? Jawabannya terletak pada penilaian E.P. Thompson (dalam Scott, 1990) mengenai identifikasi terhadap titik-titik pertentangan kepentingan kelas. Petani bukannya gagal dalam mengidentifikasi titik pertentangan kepentingan kelas, tetapi sebaliknya bahwa proses perjuangan kelas petani

telah mengidentifikasi titik persinggungan yang penting antara pengambilalihan surplus yang dilakukan oleh kepentingan pedagang dan kerja samanya dengan pengurus KUD untuk memanipulasi kekuasaan. Di satu sisi, titik persinggungan itu merepresentasikan kelas-kelas dominan yang disimbolisasikan oleh KUD. Di sisi lain, petani telah mengidentifikasi peralihan bentuk surplus dari hak petani yang diambilalih oleh pedagang melalui institusi KUD.

KUD di Kali Loro adalah KUD perintis yang diresmikan tahun 1963. Pada awalnya bernama BUD (hanya selama dua tahun), kemudian berubah menjadi Koperta (Koperasi Pertanian) yang ada di setiap desa, dan menjadi KUD tahun 1967. Pendiri sekaligus ketua KUD adalah Pak Pa sampai tahun 1994. Di bawah kepemimpinannya, KUD berkembang pesat. Beberapa koperasi lain telah dibina, dan prestasi ini telah menghantarkannya menjadi wakil daerah tingkat II untuk membentuk sekaligus menjadi pengurus PUSKUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerahnya itu pula, Pak Pa dikenal penduduk sebagai bapak perintis koperasi.

Persoalan segera muncul, khususnya di mata petani, ketika Pak Pa akan pensiun dan tidak

ada tokoh ataupun kader yang sederajat dengannya. Orang terdekatnya waktu itu, yaitu Pak Mi, adalah kandidat karena jabatannya sebagai wakil ketua KUD. Ia dipertimbangkan karena memiliki pengalaman administrasi dan disiplin yang tinggi apalagi sebagai mantan camat. Atas dasar pengalaman itu kemudian Pak Mi diangkat sebagai ketua KUD periode tahun 1994/1998 dan 1998/2002. Satu hal yang telah dilupakan adalah bahwa Pak Mi tidak memiliki pengalaman langsung dalam melayani berbagai macam kebutuhan petani dan memfungsikan KUD itu sebagai usaha bersama petani. Sebaliknya, KUD telah difungsikan menyimpang dan hanya melayani kebutuhan pengurus dan pedagang.

Pada waktu dibentuk BPPC, KUD ini mengeruk keuntungan yang besar dari pedagang Cina. Mereka harus mendapatkan SKA (Surat Keterangan Asal Cengkeh) yang hanya dikeluarkan oleh KUD untuk disetorkan ke BPPC. Begitu pula kerja sama dengan PT. PUSRI, yang mencakup 9 KUD di daerah tingkat II tersebut, telah memberikan keuntungan yang cukup besar. Kini ketika distribusi pupuk itu dihentikan, KUD menampung pupuk hanya untuk melayani para pedagang. Petani kecewa karena ketika mereka

mebutuhkan pupuk dan obat, persediaan di KUD telah habis.

Seorang mantan kadus bercerita mengenai pengalaman bekerja sama dengan KUD semasa masih menjabat. Ia menunjukkan bagaimana korupsi sudah biasa terjadi di KUD. Tiba-tiba seorang petani menyahut, kalau begitu

Pak Mantan Kadus dulu juga korupsi. Orang seperti saya ini kalau korupsi hanya sedikit, jawab mantan kadus itu. Kemudian Pak Mantan Kadus menunjukkan korupsi di KUD, seperti dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Secara spontan, tiba-tiba seorang petani

Tabel 5
Persepsi dan Resistensi Petani terhadap KUD di Kali Loro

Persepsi Petani	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
1. Tidak transparan		
a. Usulan petani tidak diperhatikan	a. Tidak ikut rapat	a. Mengkritik di belakang
b. Laporan rapat direkayasa	b. Malas berpendapat	b. Diam
c. Pemotongan dana		c. <i>Ngrasani</i> (menggospip)
2. Peran dan fungsi terbatas		
a. Tidak menampung gabah petani	a. Petani menjual padi ke penebas	a. Menggerutu
b. Pelayanan terbatas jasa penggilingan padi dan jual-beli kebutuhan rumah tangga	b. Petani membeli benih, pupuk, dan obat ke bakul dan toko pertanian di Muntilan	b. Menggerutu
c. Melayani pedagang	c. Tidak membeli ke KUD	
3. Citra buruk ketua		
a. Mantan camat yang dipecat	a. Enggan berhubungan	a. <i>Ngrasani</i> (menggospip)
b. Pandai berkelit	b. Malas berdebat	b. Diam
c. Mengabaikan suara petani	c. Mencemooh	c. Kecewa
d. Tidak ada reorganisasi	d. Mengkritik	d. <i>Ngrasani</i> (menggospip)

Sumber: Diolah dari Data Wawancara, 1999

muda berteriak, “Bakar saja KUD itu!”

Semangat luar biasa petani muda itu berlangsung di belakang, dan pada hari itu tidak terjadi pembakaran KUD. Seandainya Lenin mendengar suara ini, ia akan berkata, “tidak ada artinya bagi kemajuan partai”, tetapi itulah senjata-senjata biasa yang dimiliki petani untuk melawan kelas-kelas atasan. Mengkritik, mencemooh, membeberkan kelemahan dan kecurangan KUD bukannya tanpa makna. Petani dirugikan atas suatu ketidakadilan sehingga mereka harus membeli pupuk dan obat ke pedagang yang harganya lebih mahal daripada di KUD.

Sistem koperasi yang tujuannya untuk saling menguntungkan antara petani dan KUD itu telah dilanggar. Sebagian keuntungan beralih ke pedagang dan ketua KUD dan kemudian pedagang itu menjerat petani dengan cara menaikkan harga pupuk. Dalam kolusi ini sangat mungkin ketua KUD mengambil peran penting karena sifat kepemimpinannya yang *bapakisme*, dalam arti hubungan kerja itu seperti bapak-anak. Semakin represif ketua semakin tinggi pedagang menjerat petani sehingga senjata perlawanan mereka itu lebih diarahkan kepada ketua KUD daripada pedagang.

Sapi Perah dan Reprisivitas Simbolik

Reposisi kelas rendahan ke kelas atasan berlangsung di sektor non-farm. Kekuatan itu bersifat unik karena telah membalik posisi kelas rendahan ke kelas atasan, dengan posisi yang tetap. Reposisi kelas-kelas ini terkait dengan cerita Pak Ka yang memulai usahanya dari *mendreng* menjadi pengusaha besar. Berbagai tahapan kelas ia lalui dan melibatkan hubungan antarkelas, baik itu kelas rendahan maupun kelas atasan.

Pak Ka adalah orang yang menonjol dalam berhitung dibandingkan dengan teman semasa masih sekolah. Ia tidak menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi karena persoalan biaya. Setelah meninggalkan bangku kuliah, ia mulai usaha *mendreng*. Pekerjaan ini ditekuninya cukup lama sehingga dikenal sebagai *tukang mendreng*. Para kreditornya bukan hanya berasal dari satu desa, tetapi sampai wilayah kecamatan dan kabupaten lain. Barang dagangannya sangat laku dan dibeli dengan sistem kredit.

Penarikan kredit itu dilakukannya selama bertahun-tahun. Pada masa itu, ia juga menggali pengalaman kerja *kasaran* di kelas rendahan menjadi kuli bangunan, kuli tambang pasir, *kernet bus*, dan

mencarikan penumpang bus di perempatan jalan desa. Pekerjaan yang mengesankannya adalah menjadi kuli batu dan pasir. Pekerjaan ini yang kemudian membentuk cita-citanya menjadi pengusaha batu dan pasir.

Pada awal tahun 1980-an, Pak Ka memiliki sebuah truk yang dioperasikan untuk mengangkut batu dan pasir ke proyek bangunan. Keuntungan mulai diraihinya dengan prinsip seperempat dari keuntungan itu dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga dan tiga perempat untuk mengembangkan usaha. Melalui jaringan awal usahanya dan keuntungan-keuntungan yang terus dikembangkan, truk demi truk ia miliki. Pada awal dekade 1990-an ia memiliki 45 buah truk. Kebutuhan akan tanah pun mendesak untuk parkir truk-truk itu. Tanah pekarangan di sekitar rumahnya sekarang telah menjadi miliknya untuk parkir truk.

Kebutuhan dan rotasi tenaga kerja di perusahaan Pak Ka ini cukup tinggi. Menurut penuturan Pak Ka, pada akhir tahun 1998 jumlah tenaga kerja mencapai 170 orang, termasuk orang-orang yang dahulu sering mengajaknya untuk menaikkan batu dan pasir ke atas truk dan memberikan jasa kepadanya. Mereka yang dahulu bersikap biasa dengan Pak Ka

sekarang terlihat tunduk dan patuh. Memandang wajahnya pun mereka segan dan tidak percaya diri. Sikap *angker* ini muncul di samping karena posisinya, juga karena dikenal penduduk memiliki kekuatan gaib/magis yang berfungsi memberikan kontrol ketat kepada pekerjanya untuk tidak berbuat curang.

Kontrol yang diberikan atas bentuk-bentuk perlawanan semacam itu adalah kematian yang terjadi secara magis. Kekuatan ini terkesan represif dan simbolik, bukan hanya kepada pekerjanya, tetapi juga kepada penduduk desa. Di kalangan penduduk desa, sedapat mungkin berhubungan dengan Pak Ka itu dihindari karena memasuki wilayah represivitas simbolik. Untuk mengantisipasi hal itu penduduk biasanya mendasari (memberikan dasar kekuatan magis pada dirinya) dengan kekuatan magis lain. Seorang sopir truk misalnya, pernah melakukannya sehingga ia berani melawan dengan sikap masa bodoh terhadap represivitas Pak Ka, acuh saja, tidak mengikuti aturan yang ditentukan Pak Ka, seperti membantah dan mencuri kecil-kecilan.

Di kalangan buruh pabrik penggilingan batu, bentuk dominasi itu bukan hanya

menyetuh alam pikiran simbolik, tetapi juga pemaksaan yang harus dilakukan, dan menerima apa yang diberikan Pak Ka secara minimal. Dilihat dari jam kerja yang sangat panjang (10 s.d. 12 jam per hari) dan upah yang sangat rendah, peralihan bentuk surplus dari buruh ke tangan Pak Ka sangat mungkin terjadi, dengan dalih menguasai alat produksi. Walaupun Pak Ka dijauhi penduduk desanya, banyak orang luar yang datang

untuk mencari pekerjaan. Kenyataan ini tidak membuat risau Pak Ka apabila buruhnya mogok karena buruh itu justru akan di PHK dengan mudah.

Pembangangan dan Pemalsuan Identitas Politik

Kenyataan bahwa kelompok pengacau pun memiliki peran penting dalam dinamika struktur agraris. Siapa yang dicirikan *free riders* (pembonceng) oleh Popkin (1986), misalnya? Salah satunya

Tabel 6
Persepsi dan Resistensi Pekerja dan Penduduk terhadap Pak Ka di Kali Loro

Persepsi Pekerja dan Penduduk	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
Kaya karena curang, kolusi dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan	Penduduk memasang TPR pada ruas jalan masuk ke sungai yang dilalui truk-truk Pak Ka	<i>Ngrasani</i> (menggossip)
Pelit dan mahal	Mencuri barang kecil-kecilan seperti mur dan sekrup, mencuri waktu kerja, memperlambat kerja, dsb.	Seruan peringatan, "jangan kerja di sana"; "jangan beli di sana".
Memeras, keras, dan tanpa perasaan	Tidak membeli barang ke toko Pak Ka. Malas berhubungan kerja, mencuri waktu, merusak mesin, dan keluar kerja	Menggerutu
Kontrolnya sangat ketat	Mencuri waktu dan mengelabui.	Menggerutu
Punya " <i>buto ijo</i> ", setiap kekayaannya ada yang menunggu	Mencari lambaran dan " <i>memagar</i> " rumahnya dari kekuatan magis.	Menggossip

Sumber: Hasil Wawancara, 1999

adalah pengacau. Mereka adalah orang yang mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain, dari kerja keras kelas rendahan, menjadi *centeng* atau merongrong kewibawaan kelas atasan, dan dengan sedikit kesadaran politik, menjadi penjegal, ataupun pelampiasan emosional dari kecemburuan sosial. Sekarang sudah jelas bagaimana pengacau telah mengambil alih surplus penduduk atas suatu legitimasi kekuatan dengan cara semena-mena.

Apabila dicermati siapa yang menjadi pengacau, jawabannya terletak pada keterkaitan antara gerombolan, pemuda, dan tawuran. Keterkaitan antara ketiganya mengidentifikasi suatu kehidupan pemuda yang kelim, mabuk, berjudi, mencuri, berkelahi, dsb. Inti dari persoalan ini adalah meletakkan pembangkangan pemuda dalam suatu konstelasi penting komposisi struktur agraris. Pembangkangan terjadi dari dominasi orang-orang tua terhadap kepatuhan. Perlawanan terhadap sistem dominasi itu berupa keacuhan mereka terhadap persoalan ekonomi rumah tangga yang dihadapi oleh orang tua mereka. Apabila dalam praktek kehidupan sehari-hari orang tua mereka mengajarkan perjuangan hidup melalui bekerja sebagai: petani, petani penggarap,

buruh tani, dan kegiatan non-*farm* lainnya, pemuda mengambil posisi seenaknya, mengacuhkan ajaran hidup itu dan terbuai dalam suatu keinginan hidup enak tanpa bekerja keras. Gaya kehidupan populer semacam ini tampaknya juga berpengaruh pada kehidupan remaja Kali Loro, terutama remaja-remaja perempuan. Iklan dan sinetron, dalam acara televisi, barangkali memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan gaya hidup populer.

Kebiasaan *nongkrong* yang dilakukan, baik malam maupun siang hari, bukanlah suatu retorika dari persoalan pengangguran di desa, tetapi lebih sebagai suatu penolakan terhadap kerja pertanian yang digeluti orang tua mereka. Apabila orang tua mereka bekerja untuk memperjuangkan hidup, pemuda ini menggantungkan hidup dari perjuangan itu yakni menolak perjuangan hidup. Dalam hubungan ini, apa bedanya pemuda itu dengan pengacau, yang juga mengambil keuntungan dari kerja keras kelas atasan dan bawahan dalam arti mengambil alih surplus dari perjuangan kelas mereka walaupun terhadap orang tua mereka sendiri.

Cerita mengenai pemuda berikut bukan ditujukan untuk menganalisis pembangkangan terhadap dominasi orang tua,

melainkan sebagai kategori kelas, mereka memiliki dunianya (subkultur) yang dalam cerita singkat berikut dijadikan basis pembangkangan sekelompok pemuda. Cerita mengenai pembangkangan ini mengambil momentum penting dari proses berlangsung pemilu tahun 1999. Momentum ini tampaknya dapat menjelaskan peran pemuda dalam perubahan sosial, kaitannya dengan wilayah perlawanan mereka yang terbuka. Dalam tradisi Scottian, wilayah perlawanan pemuda ini dicirikan dengan interaksi terbuka terhadap kelas negara yang diperankan oleh partai politik dominan.

Sebagaimana dianjurkan pemerintah pusat, pada hari pelaksanaan kampanye partai politik, massa masing-masing partai boleh berkampanye yang salah satunya ditandai dengan

pemasangan bendera partai politik. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kepala desa juga menganjurkan warganya untuk memasang bendera partai politik itu baik di depan rumah maupun di jalan umum. Untuk merespons anjuran pemerintah pusat ini, kepala desa mengerahkan sejumlah orang melalui kepala dusun untuk memasang bendera partai politik di jalan umum.

Pemasangan bendera ini menghadapi masalah di Dusun Se dengan sekelompok pemuda yang biasa *nongkrong* di jalan itu. Sebelum hari pemasangan bendera, sekelompok pemuda telah menolak memasang bendera partai politik apa pun di jalan tempat mereka *nongkrong*. Alasannya bersumber dari banyaknya peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah

Tabel 7
Persepsi dan Resistensi Pemuda terhadap Partai Politik (Golkar) di Kali Loro

Persepsi Pemuda	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
Tidak bertanggung jawab terhadap kerusuhan massa Golkar adalah partai kaya Golkar sangat dominan (pada masa Orde Baru)	Tidak memasang bendera. Tidak ikut kampanye. Mencuri uangnya Pura-pura memasang bendera Golkar	Pasif, diam, tidak antusias, tidak peduli. Memalsukan identitas politik Seruan moral ABG (Asal Bukan Golkar)

Sumber: Data Wawancara, Diolah, 1999.

yang berkaitan dengan kampanye: “Kalau terjadi kerusuhan di tempat ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Paling-paling kita sendiri. Orang pusat yaitu pengurus partai politik belum tentu mau bertanggung jawab.”

Atas dasar itu mereka menolak memasang bendera partai politik, dengan segala kemungkinan risiko yang akan diambil oleh kepala desa. Mereka mengatakan kepada orang-orang suruhan kepala desa itu untuk tidak memasang bendera di daerahnya: “*Mas, mangke panjenengan aturke kalih Kepala Desa, menawi kepareng pemuda Dusun Se mriki mboten masang gendera kemawon*” (Mas, nanti tolong disampaikan ke Kepala Desa, kalau boleh pemuda Dusun Se tidak usah memasang bendera saja), demikian dikatakannya. Orang-orang itu tidak jadi memasang bendera dan menyampaikan alasan itu kepada kepala desa.

Alasan itu tidak diperhatikan oleh kepala desa, dan pada malam harinya bendera itu dipasang. Perintah ini menimbulkan konflik yang semakin buruk karena keesokan harinya bendera-bendera itu telah rusak: sobek, tumbang, dan hilang. Beberapa

yang tersisa akhirnya dicabuti kembali oleh orang-orang suruhan kepala desa dan daerah itu kembali kosong dari bendera partai politik.

Peristiwa ini membawa konsekuensi serius bagi pemuda. Kepala desa memanggil mereka ke kantor desa untuk dimintai keterangannya. Perdebatan tak terhindarkan antara mereka dengan kepala desa. Di satu sisi, kepala desa menggunakan legitimasi “milik umum” sehingga jalan bisa digunakan siapa saja. Di sisi lain, pemuda bersikeras tidak bersedia memasang bendera itu dengan alasan kalau ada kecacauan, siapa yang mau bertanggung jawab. Perdebatan itu akhirnya dimenangkan kepala desa atas legitimasi publik, dengan suatu syarat dari pemuda, bersedia memasang apabila disediakan seluruh bendera partai politik yang ada di wilayah kecamatan.

Malam harinya, kepala dusun mengadakan rapat untuk membahas masalah itu. Perdebatan kembali terjadi antara kepala dusun dengan menggunakan alasan yang sama dengan kepala desa dan pemuda dengan menyarankan, simpatik itu boleh

* Peristiwa-peristiwa itu seperti yang pernah terjadi beberapa kali di Yogyakarta antara massa pendukung PPP dan PDI Perjuangan, dan di daerah-daerah pantai utara Pulau Jawa seperti di Demak, Jepara, dan Pekalongan antara massa pendukung PPP dan PKB yang mengakibatkan: luka-luka, bahkan sampai terjadi kematian.

saja, tetapi tidak usah kelihatan seperti itu. Kalau terkena kerusuhan kita sendiri yang menanggung, pengurus partai pusat belum tentu bertanggung jawab, dan orang tua yang pasif menunggu persetujuan bersama. Perdebatan kembali dimenangkan oleh kepala dusun dan disepakati untuk memasang semua bendera partai politik.

Setelah pemasangan bendera itu, terlihat pada malam hari ada dua orang mengendarai sepeda motor dengan membawa pedang berhenti di setiap bendera Golkar. Mereka merusaknya, mengiris bendera, membacok tiangnya, dan mencabut tiang bendera itu. Orang yang melihat peristiwa itu diam seolah-olah tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka membiarkan kedua orang itu merusak bendera Golkar. Peristiwa ini mengagetkan penduduk desa keesokan harinya. Berita mengenai perusakan bendera itu dengan cepat tersebar ke seluruh desa. Mereka membicarakan peristiwa ini secara diam-diam dan mengalihkan pembicaraan ketika orang datang.

Dalam beberapa hari bendera-bendera Golkar yang rusak itu dibiarkan tanpa ada orang yang mengurusinya. Atas inisiatif kepala desa, bendera Golkar itu dibersihkan sehingga jalan itu kembali kosong dari bendera Golkar.

Peristiwa itu mengisyaratkan untuk tidak memasang bendera Golkar. Sementara itu, bendera partai politik lain tetap berkibar sampai hari kampanye dinyatakan selesai. Siapakah pelakunya dalam insiden kecil yang menimpa Golkar ini bukan menjadi pokok bahasan utama cerita ini. Cerita ini ingin menunjukkan bahwa perlawanan sistem dominasi negara yakni pemerintah yang diperankan oleh partai politik itu telah dilakukan secara terbuka.

Interpretasi terhadap Cerita Resistensi

Ketiga cerita tersebut setidaknya tidaknya mendukung definisi resistensi yang diajukan oleh Scott. Dari ketiga cerita itu, tidak ada sifat perlawanan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh organisasi modern Leninisme dan demokrasi kapitalis. Perlawanan mereka berada di luar kedua *mainstream* itu dengan tetap berbasis pada analisis kelas untuk melihat persoalan ketidakadilan. Bentuk-bentuk perlawanan yang ditawarkan memenuhi sifat-sifat yang diajukan oleh Scott, antara perlawanan *nyata* di satu pihak dan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental atau epifenomenal di pihak lain. Demikian, dengan ketiga segi yang diajukan

Scott dalam memandang definisi mengenai resistensi itu.

Berdasarkan kategori resistensi yang telah diajukan oleh Scott, cerita KUD dan ceritera sapi perah memenuhi apa yang disebut sebagai *hidden transcript*. Perlawanan pada cerita tersebut ini diperankan oleh orang tua yang merasakan hubungan kerja itu sebagai hubungan kelas. Identifikasi terhadap persoalan ini berlangsung dalam suatu proses dialektika antara identitas kelas dan kesadaran kelas, dalam suatu perjuangan kelas antara kelas-kelas subordinat dan kelas-kelas dominan di desa itu. Secara singkat dikatakan bahwa wilayah perlawanan cerita tersebut ini berada pada tingkat, kepentingan, dan institusi desa. Sebagai kasus, dapat dikatakan bahwa setiap desa akan mengalami cerita yang berbeda karena pengalaman kelasnya yang berbeda pula.

Kategori perlawanan *public transcript* terlihat pada cerita pembangkangan dan pemalsuan yang diperankan oleh pemuda. Secara tematik, wilayah perlawanan cerita ini ada pada kekuasaan politik, bukan ekonomi seperti cerita sebelumnya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan politik maka ia menembus batas administratif pemerintahan, bukan tingkat desa melainkan pusat kekuasaan. Sifat perlawan-

an ini terbuka dan terinteraksi secara langsung. Berbeda dengan cerita sebelumnya, cerita pemuda ini menimbulkan konflik yang dapat dirasakan bersama dan membawa akibat-akibat perubahan terhadap sikap dan perilaku politik. Perlawanan semacam ini mendukung definisi di atas, yaitu antara perlawanan *nyata* dan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari ketiga cerita itu dapat ditarik benang merah bahwa perlawanan berlangsung dalam suatu hubungan- subordinasi dan dominasi. Perlawanan terjadi dari kelas rendah atau yang disubordinasi terhadap kelas atasan atau yang mendominasi. Titik pertentangan kepentingan kelas diidentifikasi sebagai suatu pengambilalihan surplus oleh kelas atasan dari "hak" kelas rendah, dengan dalih menguasai alat produksi dan kekuasaan politik. Dengan demikian, perlawanan itu berlangsung dalam suatu hubungan dominasi dan subordinasi yang timpang, yang diakibatkan oleh adanya suatu ketidakadilan dalam hubungan itu, seperti pengambilalihan surplus dan manipulasi kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun simbol-simbol budaya.

Penutup

Kendati tidak dimaksudkan sebagai studi banding dan kajian historis terhadap studi terdahulu, dibandingkan dengan situasi seperempat abad yang lalu, dinamika struktur agraris di Kali Loro mengalami suatu perkembangan yang kompleks dewasa ini. Perkembangan kesatuan-kesatuan sosial dan hubungan-hubungan sosial berkembang secara variatif, ditandai dengan kerumitan hubungan-hubungan kelas dan perhatian terhadapnya yang semakin hati-hati. Identifikasi

terhadap kelas-kelas itu memasuki suatu subkultur-subkultur yang kiranya semakin sempit, sebagai suatu kelas-kelas yang memiliki identitas dan kesadarannya. Dapat dikatakan bahwa proses identifikasi terhadap kelas-kelas itu kini berlangsung semakin solid. Dalam arti yang lain, hal ini juga menunjukkan bahwa polarisasi sosial di perdesaan itu cenderung semakin menguat sehingga bisa mengancam kerukunan hidup di desa itu dari hubungan-hubungan kekeluargaan dan gotong-royong.

Referensi

- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Scott, James C. 1983. "Api kecil dalam pertentangan kelas," *Kajian Malaysia* I, 1 Juni.
- . 1990. *Domination and the Art of Resistance Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- . 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stoler, Ann. 1975. "Class structure and female autonomy in Rural Java," *The Seventy-fourth Annual Meeting of the American Anthropological Association*, San Francisco, December.
- White, Ben. 1999. "Struktur Agraris", catatan intern untuk Tim Kali Loro, BW/3.vii.
- White, Ben and Irwan Abdullah. 1999. "Rural development, security and household welfare: 25 years of change in a Javanese village, 1973-1998," paper contributed to *The Workshop on The Economic Crisis and Social Security in Indonesia*, Nijmegen, The Netherlands, 7-9 January.